

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**MAGFIRAH**

**NIM: 10300113244**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Magfirah

Nim : 10300113244

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar kesariaannya yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 16 Juli 2017

Penyusun

**MAGFIRAH**

Nim: 10300113244

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *"Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)"*. Yang disusun oleh saudara/I **MAGFIRAH**, NIM: 10300113244, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 19 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 25 Juli 2017

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum

Munaqisy I : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A

Munaqisy II : Dr. Alimuddin, M.Ag

Pembimbing I : Dr. Hamzah Hasan, M. Hi

Pembimbing II: Awaliah Musgamy, S. Ag., M. Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji dan syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa dari masa kegelapan kepada masa yang terang benderang.

Dalam menulis skripsi ini, penulis sedikit mendapat kendala dan hambatan, sejak mulai tahap perencanaan skripsi sampai terwujud dalam bentuk sekarang ini, namun semangat dan motivasi yang tinggi sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini, setelah mengadakan penelitian lapangan dan banyak mendapat buku-buku lewat perpustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi tersebut.

Skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)”** penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan motivasi, membantu, dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Abu Rahman (Alm) dengan Ibunda

Miswah (Alm) yang telah memberikan penulis inspirasi dan motivasi. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberi ruang kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Hijau ini.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf yang telah banyak membantu selama penulis menjalankan aktifitas akademik.
3. Ibunda Dra. Nila Sastrawati, M.Si, selaku Ketua Jurusan dan Ibunda Dr. Kurniati, M.Ag. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, serta Kak Canci selaku staf Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah mendukung dan memberi saran kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.Hi, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan mengarahkan penyusun dalam merampungkan skripsi ini.
5. Ibu Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingannya.
6. Pihak Pengadilan Negeri Makassar yang telah banyak membantu selama melakukan penelitian.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang dengan penuh keikhlasan dan ketulusannya mencurahkan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.

8. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabatku Hanisa Ayu Solichin dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan angkatan 2013, terima kasih atas motivasinya.
10. Muhammad Amin yang selalu ada menemani dan memotivasi penulis.
11. Teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 53 dari Kel. Cikoro, Kec. Tompobulu, Kab. Gowa: Arif, Ayu, Hani, Alfian, khusnul, Jumi, Anti, Aan, dan Rahman, yang telah memberikan dukungan moril.

Sebagai insan biasa yang tak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan kedepan.

***Wassalumu Alaikum Wr. W***

Makassar, 30 April 2017

Penulis

Magfirah

NIM. 10300113244



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim .....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian tindak pidana .....	15
2. Unsur-unsur tindak pidana .....	16



3. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana .....	18
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan .....	19
1. Pengertian pencabulan .....	19
2. Bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan .....	20
3. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencabulan .....	29
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak Dibawah Umur .....	30
1. Pengertian anak dibawah umur .....	30
2. Perlindungan anak dibawah umur sebagai korban pencabulan .....	33
E. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Pendekatan Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	41
F. Instrument Penelitian .....	41
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Duduk perkara .....	47
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur .....	49

D. Sanksi Pemidanaan bagi Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam .....	55
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**



## ABSTRAK

**Nama : MAGFIRAH**

**Nim : 10300113244**

**Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi kedalam 2 sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur? 2) Bagaimana sanksi pemidanaannya bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan normatif *syar'i* dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada instansi Pengadilan Negeri Makassar untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode interview, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap hakim terkait masalah yang diputus, dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, sementara itu pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban. Hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Dalam perspektif hukum islam pencabulan merupakan bentuk jarimah *ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pencabulan berupa hukuman jilid.

Implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya penegak hukum mampu melihat segala aspek pertimbangan dalam rangka memberikan suatu putusan sehingga mampu mengakomodir rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era Orde Baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara lain perkosaan, pelecehan seksual terhadap anak.

Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.<sup>1</sup>

Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana. Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan. Diberbagai massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

---

<sup>1</sup> Francis Wahono, *Kekerasan dalam Pendidikan, Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika, dalam Gelombang Perlawanan Rakyat Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), h. 232

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, dalam perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan Kejahatan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah: “tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.<sup>2</sup>

Tindak Pidana pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu melalui berbagai media massa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan.

---

<sup>2</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: BPK Gunung Mulya, 1982), h.17

Padahal, apabila mengetahui lebih dalam mengenai efek negatif dari tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur justru jauh lebih menghancurkan masa depan anak yang menjadi korbannya dengan merampas kebahagiaan seorang anak yang menjadi korbannya serta merampas secara paksa hak-hak asasi anak tersebut. karena anak merupakan sumber potensi yang akan meneruskan pembangunan negara ini.

Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur merupakan suatu persetubuhan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana pencabulan yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya, oleh karena itu penekanan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain.<sup>3</sup> Bagi umat Islam segala yang tidak layak di sebut abnormal sedangkan yang layak di sebut normal, dengan persepsi muslim normal dapat di rumuskan dengan adanya kesadaran diri sebagai makhluk ciptaan ilahi yang memiliki kelebihan dan kekurangan serta memiliki kesadaran yang realita benar dan salah. Dengan kondisi yang abnormal dapat menyebabkan penyimpangan terhadap dorongan seks itu sendiri yang di lakukan tanpa didadasari adanya tanggungjawab dan adanya ikatan yang sah dalam perkawinan. Karna ini sudah termasuk perbuatan melawan hukum, firman Allah dalam Q.S Al-Isra/17: 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

<sup>3</sup> Armada Wina, *Wajah Hukum Pidana* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h.12

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>4</sup>

Penjelasan ayat:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى

“Dan janganlah kalian mendekati zina”

Larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi

إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji”

Perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek (jalan) adalah perbuatan zina itu. Rasulullah saw telah memberikan peringatan bahwa merebaknya perzinahan merupakan salah satu tanda kehancuran peradaban manusia dan merupakan tanda-tanda datangnya kiamat

Perbuatan zina itu sangat kotor, sehingga Allah swt memerintahkan kepada penguasa untuk menegakkan hukuman bagi siapa yang berzina itu dijatuhkan hukuman 100 kali dera, sebagaimana tersebut firman Allah dalam Q.S An-Nuur/24: 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 388

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>5</sup>

Penjelasan ayat:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka cambuklah masing-masing 100 kali.”

Dalam surah ini yang dijadikan pokok adalah hukuman terhadap orang yang berzina, perempuan ataupun lelaki. Barang siapa berzina dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sesudah menikah atau lajang, maka cambuklah seratus kali.

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

“Janganlah kamu dipengaruhi oleh rasa kasihan dalam menjalankan hukum Allah”

Janganlah rasa kasihan terhadap pezina mempengaruhi kamu dalam menjalankan hukum Allah dan mengakkan had-Nya. Tegasnya janganlah karna rasa kasihan kepada mereka yang bersalah membuat kamu tidak menjalankan hukum Allah .

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 488



“Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir”

Jika kamu membenarkan Allah dan mengetahui bahwa kamu akan dibangkitkan (dihidupkan) kembali untuk dihisap dan diberi pembalasan pahala atau siksa, maka laksanakanlah segala hukum yang telah dijatuhkan kepada para pezina

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan hendaklah pelaksanaan hukum cambuk itu disaksikan oleh segolongan mukmin”

Hukum cambuk itu hendaklah dilaksanakan didepan orang ramai, supaya lebih menakut-nakuti orang yang ingin berzina dan supaya menjadi pelajaran bagi orang lain

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapa pun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pada beberapa kejahatan kita juga sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menyimpannya itu, perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian dalam kedudukannya sebagai korban kita juga harus melihat bahwa korban adalah sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Sehubungan dengan itu untuk mencerahkan permasalahan penting

ini kita harus ikut serta berperan dalam melindungi anak khususnya anak yang masih dibawah umur.

Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang-kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum dimasyarakat. Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak.

Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, kadang dalam mengambil keputusannya untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Telah di jelaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib di lindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang tertuang dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul **“Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam”**

## **B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian**

### **1. Deskripsi Fokus**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang di anggap penting, antara lain:

- a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

### **2. Fokus Penelitian**

- a. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan.<sup>7</sup>
- c. Pencabulan berasal dari kata cabul, cabul adalah segala macam wujud perbuatan yang di lakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>8</sup>
- d. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 11 KUHP UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

<sup>7</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia* ( Wipress, 2007), h. 335

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 135

harus kita jaga karna dalam dirinya terlekat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.<sup>9</sup>

- e. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa al-Qur'an, hadits Nabi saw, pendapat sahabat, tabi'in, maupu pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>10</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka fokus permasalahan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini terbagi atas dua sub masalah yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?
2. Bagaimana sanksi pembedanaannya bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam?

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka penulis akan memberikan penjelasan keterkaitan antara masalah pokok yang akan di uji dengan beberapa teori yang ada dalam literatur yang di gunakan.

Adapun masalah pokok yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (Jakarta: Permata Press, 2007), h. 317

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, (Cet. 1; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281

pencabulan anak di bawah umur. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka di lengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang di maksud di antaranya sebagai berikut;

1. Adam Chazawi dalam bukunya *Tindak pidana mengenai kesopanan*, pada buku ini pencabulan di uraikan lebih rinci pada bab IV, yakni kejahatan kesusilaan mengenai perbuatan cabul, arti dari pencabulan, tindak pidana pencabulan beserta sanksinya dan unsur-unsur dari kejahatan perbuatan cabul termasuk unsur obyektif dan unsur subyektif. Menjelaskan bahwa perbuatan cabul termasuk dalam kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan kejahatan-kejahatan yang objek kejahatannya berupa kepentingan hukum yang di lindungi itu adalah rasa kesusilaan masyarakat (yang berhubungan dengan seksual). Buku ini sudah menjelaskan apa pencabulan, serta sanksi yang sesuai dengan perbuatan tersebut.
2. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, didalam buku ini menjelaskan beberapa hal diantaranya ketika anak berkonflik dengan hukum dan peradilan pidana anak.
3. Ahmad Rifai dalam bukunya *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, dalam buku ini memberikan gambaran mengenai bagaimanakah seharusnya seorang hakim menemukan hukum dalam praktik di Pengadilan, dengan tidak hanya berdasarkan pada paradigma hukum positif yang legalis formal, melainkan telah menjauhkan pada nilai-nilai kearifan yang berkembang dimasyarakat (lebih holistik). Buku ini berisi tentang teori-teori dan metode-metode yang berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim.

4. Hamzah Hasan dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Buku ini menjelaskan tentang sanksi hukum dari perbuatan cabul dan pemerkosaan, namun dalam buku ini tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak dibawah umur.
5. Teguh Prasetyo dalam bukunya *Hukum Pidana*, dalam buku ini yang dapat penulis tangkap adalah pengertian, asas-asas, tindak pidana, dan jenis-jenis hukuman atau sanksi, buku ini tidak menjelaskan tentang pencabulan hanya menjelaskan tentang garis-garis besar tindak pidana.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap melakukan penelitian, tentu peneliti memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pembedanaannya bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Dapat kita ketahui bahwa kegunaan penelitian terbagi atas 2 bagian:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, dari hasil pembahasan ini diharapkan bahwa dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum perlindungan anak di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai tambahan bahan kajian bagi penegak hukum, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam tindak pidana pencabulan anak. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui dan mendalami masalah-masalah tindak pidana pencabulan anak.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang di lakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang di gunakan ole hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### **1. Teori Keseimbangan**

Yang di maksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h.74

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 102



syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus di lakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

## 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang di sengkatakan sebagai dasar hukum dalam

penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus di dasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:<sup>13</sup>

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

#### **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

##### 1. Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

##### a. Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang di definisikan sebagai perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

---

<sup>13</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan 1983), h. 204

larangan tersebut.<sup>14</sup>

b. R. Tresna

Walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi yang menyatakan bahwa “tindak pidana” itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang di adakan tindakan penghukuman.<sup>15</sup>

c. Wirjono Prodjodikoro

Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat di timbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karna itu, dalam percakapan sehari-hari sering di dengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>16</sup>

Setelah melihat berbagai definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang di sebut tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum di larang dan di ancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif ( tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di haruskan oleh hukum).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar-dasar hukum pidana di indonesia untuk dapat di katakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut di yakini telah melanggar

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59

<sup>15</sup> Adami Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 72

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 47

beberapa unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP di bagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

a. Unsur subyektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*) pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventus*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni:

1. Tak berhati-hati;
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku terdiri atas;

1. Perbuatan manusia, berupa:<sup>17</sup>
  - a. act, perbuatan aktif atau perbuatan positif;
  - b. omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

---

<sup>17</sup> Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika 2005), h. 9

## 2. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

## 3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut di bedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan di lakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan di lakukan.
- c. Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat di hukum berkenaan dengan alasan-alasan membebaskan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

## 3. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan.<sup>18</sup>

- a. Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).
- b. Faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor lingkungan.

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 64

### ***C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan***

#### **1. Pengertian tindak pidana pencabulan**

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.<sup>19</sup>

KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” di samping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, yakni perpaduan alat kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, dimana di isyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kesusilaan, yang diatur dalam KUHP buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Alauddin University Press, 2012), h. 173

pelaku tidak tercapai maksudnya, karna adanya perlawanan dari pihak korban, ia di persalahkan melakukan perbuatan pencabulan yang ketentuannya di atur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karna kehendaknya sendiri.”<sup>20</sup>

## 2. Bentuk-bentuk tindak pidana pencabulan

### a. Kejahatan Mengenai perbuatan Menyerang kehormatan Kesusilaan

Hal ini di rumuskan dalam pasal 289 yang selengkapnya berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di ancam karna melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>21</sup>

Apabila rumusan pasal 289 tersebut di rinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:

1. Perbuatannya: memaksa;
2. Caranya: dengan:
  - a. Kekerasan;
  - b. Ancaman kekerasan.
3. Objeknya: seorang untuk:
  - a. Melakukan; atau
  - b. Membiarkan di lakukan.
- b. Perbuatan Cabul Terhadap Orang Pingsang, Orang Belum Berumur Lima Belas Tahun dan lain-lain.

Hal ini di rumuskan dalam Pasal 290 sebagai berikut:

Di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

<sup>20</sup> Lihat Pasal 53 Ayat (1) Republik Indonesia h. 68

<sup>21</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 78

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal di ketahuinya bahwa orang itu pinsang atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.<sup>22</sup>

Tiga bentuk kejahatan di atas di rumuskan dalam butir 1, 2 dan 3.

1. Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur:

- a) Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatannya: Perbuatan cabul;
2. Objeknya: dengan seorang;
3. Dalam keadaan:
  - a. Pinsang; atau
  - b. Tidak berdaya:

- b) Unsur subjektif

Di ketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pinsang atau tidak berdaya.

2. Kejahatan butir 2 mempunyai unsur-unsur:

- a) Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatannya: perbutan cabul;

---

<sup>22</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 81



2. Objeknya: dengan seorang;
3. Yang;
  - a. Umurnya belum lima belas tahun, atau
  - b. Jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk di kawin.
- b) Unsur subjektif:
 

Di ketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum lima belas tahun.
3. Kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur:
  - a) Unsur-unsur objektif:
    1. Perbuatannya: membujuk;
    2. Objeknya: orang yang;
      - a. Umurnya belum lima belas tahun, atau
      - b. Jika umurnya belum jelas belum waktunya untuk di kawin;
    3. Untuk;
      - a. Melakukan perbuatan cabul;
      - b. Di lakukan perbuatan cabul; atau
      - c. Bersetubuh di luar perkawinan.
  - b) Unsur subjektif:
 

Yang di ketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin.
  - c. Perbuatan cabul sesama seksual (homoseksual)

Hal ini di rumuskan dalam pasal 292 yang rumusannya sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.<sup>23</sup>

Pada pasal ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatannya: perbuatan cabul;
2. Si pembuatnya: oleh orang dewasa;
3. Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

b) Unsur-unsur subjektif:

1. Yang di ketahuinya belum dewasa, atau
2. Yang seharusnya patut di duganya belum dewasa.

d. Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan cabul.

Kejahatan ini di rumuskan dalam pasal 293, sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan memberi atau menjajikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya di lakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas tahun.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 88

<sup>24</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 90

Rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, terdapat dalam ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatannya: menggerakkan;
- b. Cara-caranya:
  1. Memberi uang atau barang;
  2. Menjanjikan memberi uang atau barang;
  3. Menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan;
  4. Penyesatan.
- c. Objeknya: orang yang belum dewasa;
- d. Yang baik tingkah lakunya;
- e. Untuk.
  1. Melakukan perbuatan cabul;
  2. Di lakukan perbuatan cabul dengannya.

b) Unsur subjektif

Diketahuinya atau selayaknya harus di duganya tentang belum kedewasaannya.

e. Perbuatan Cabul Terhadap anak, Anak Tirinya, dan Lain Sebagainya.

Hal ini di rumuskan dalam pasal 294 yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya di serahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya

atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Di ancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karna jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya di percayakan atau di serahkan kepadanya;
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah sakit, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di masukkan ke dalamnya.<sup>25</sup>

Kejahatan ayat (1) mempunyai unsur-unsur berikut:

a) Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b. Objek: Dengan;
  1. Anaknya yang belum dewasa;
  2. Anak tirinya yang belum dewasa;
  3. Anak angkatnya yang belum dewasa;
  4. Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa;
  5. Pembantunya yang belum dewasa;
  6. Bawahannya yang belum dewasa.

Kejahatan butir 1 ayat (2), memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek hukum pembuatnya: seorang pejabat
- b. Perbuatan: melakukan perbuatan cabul;

---

<sup>25</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 98

c. Dengan;

1. Bawahannya karna jabatan;
2. Orang yang penjagaannya di serahkan kepadanya;

Kejahatan butir 2 ayat (2), memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a.
  - 1) Seorang pengurus;
  - 2) Seorang dokter;
  - 3) Seorang guru;
  - 4) Seorang pegawai;
  - 5) Seorang pengawas;
  - 6) Seorang pesuruh;
- b.
  - 1) Dalam penjara;
  - 2) Tempat pekerjaan negara;
  - 3) Tempat pendidikan;
  - 4) Rumah piatu;
  - 5) Di rumah sakit;
  - 6) Di rumah sakit jiwa;
  - 7) Di lembaga sosial;
- c. Perbuatannya: perbuatan cabul;
- d. Objek: dengan orang yang di masukkan kedalamnya.
- f. Kejahatan Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa.

Hal di rumuskan dalam pasal 295, sebagai berikut:

(1) Di ancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa, yang pemeliharaannya, penndidikan atau penjagaannya di serahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul dengannya.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang di sebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan di lakukan perbuatan cabul tersebut.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.<sup>26</sup>

Dalam pasal ini ada dua rumusan kejahatan kesusilaan pencabulan yaitu di rumuskan pada ayat (1) butir 1 dan 2.

1. Rumusasn pada butir 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya:

- 1) Menyebabkan perbuatan cabul;
- 2) Memudahkan perbuatan cabul;

---

<sup>26</sup>Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h. 106

b. Objek:

- 1) Oleh anaknya yang belum dewasa;
- 2) Oleh anak tirinya yang belum dewasa;
- 3) Oleh anak angkatnya yang belum dewasa;
- 4) Oleh anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa;
- 5) Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya di serahkan kepadanya yang belum dewasa;
- 6) Oleh pembantunya yang belum dewasa;
- 7) Oleh bawahannya yang belum dewasa;

c. Dengan orang lain.

b) Unsur subjektif

Dengan sengaja

2. Rumusan pada butir 2, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur-unsur objektif

a. Perbuatan:

- 1) Menyebabkan perbuatan cabul;
- 2) Memudahkan perbuatan cabul;
- 3) Oleh orang yang belum dewasa.

b) Unsur-unsur subjektif

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Yang di ketahuinya belum dewasa;
- 3) Yang sepatutnya di duga belum dewasa.

g. Kejahatan Menyebabkan dan Memudahkan Perbuatan Cabul

Hal ini di rumuskan pada pasal 296 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh

orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”<sup>27</sup>.

Apabila rumusan di atas di rinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur-unsur objektif

a. Perbuatannya:

- 1) Menyebabkan di lakukannya perbuatan cabul;
- 2) Mempermudah di lakukannya perbuatan cabul;

b. Objek: oleh orang lain dengan orang lain;

c. Yang di jadikannya:

- 1) Sebagai pencaharian;
- 2) Sebagai kebiasaan;

b) Unsur-unsur subjektif:

Dengan sengaja.

h. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencabulan

Dari sejumlah pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa factor penyebab pencabulan dan perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagimembedakan antara yang seauruanya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah ahklak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.

---

<sup>27</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h.113



3. Rendahnya pengamalan dan pengkhayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat control masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang tersa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara menuntutnya untuk dicariakan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap,ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.<sup>28</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Anak Di Bawah Umur**

1. Pengertian anak di bawah umur

Anak merupakan Allah yang Maha kuasa sebagai calon generasi penerus

---

<sup>28</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Cet. 1; Bandung: Refika Aditama, 2001), h.72

bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa, “Anak adalah manusia yang kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa).”<sup>29</sup>

Dalam hukum islam disebutkan bahwa, anak adalah manusia yang belum mencapai *akil baligh* (dewasa) dan ketika sudah *baligh* ditandai dengan suatu peristiwa biologis, untuk kaum laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1 Bab XIV tentang pemeliharaan anak; “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau udah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.<sup>30</sup>

Hukum kita terdapat kemajemukan mengenai pengertian anak sebagai akibat setiap peraturan perundang-undangan memberi batas usia sendiri-sendiri mengenai apa yang di maksud dengan anak. Pengaturan tentang pengertian anak tersebut terdapat dalam pengaturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan bidang yang di aturnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain:

---

<sup>29</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 31

<sup>30</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h.137

1) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>31</sup>

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

3) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.<sup>32</sup>

4) Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>33</sup>

5) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Marlina, *Peradilan pidana Anak di Indonesia “ Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 34

<sup>32</sup>Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, h. 4

<sup>33</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”* (Bandung: PT. Grafika Aditama, 2009), h. 32

## 6) Undang-Undang Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>35</sup>

### 2. Perlindungan anak di bawah umur sebagai korban pencabulan

Perlindungan Terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian kita semua. Dalam kasus akhir-akhir ini terjadi, mulai dari penganiayaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan yang bisa di berikan terhadap anak-anak dari berbagai kejahatan yang terjadi.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang di tujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sejarah wajar, baik fisik maupun mental serta sosialnya.<sup>36</sup>

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah di lahirkan. Dalam Undang-Undang tersebut, terhadap anak tidak di benarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat di asuh dengan baik

---

<sup>34</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia “ Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”* (Bandung: PT. Grafika Aditama,2009), h.33

<sup>35</sup> Lihat Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>36</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2009), h. 25

oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang di harapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum, tetap untuk mendapat hak-haknya. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) di jelaskan pengertian mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>37</sup>

Pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Repeublik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>38</sup>

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah

---

<sup>37</sup> Lihat pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, h. 5

<sup>38</sup> Lihat Pasal 2 Butir (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, h.6

<sup>39</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h.37

perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak:

- 2) Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.
- 3) “kerjasama dan kordinasi” diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.
- 4) Perlunya diusakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- 5) Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang mementingkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- 6) Pelindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 7) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya menimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu.
- 9) Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan

kewajiban asasinya.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial, ia juga merupakan masalah kemanusiaan.<sup>40</sup>

Selain itu, dalam rangka untuk memberi rasa keadilan bagi korban, para hakim seyogyanya mempertimbangkan pemberian ganti kerugian terhadap si korban dalam tuntutan, karena merupakan suatu hal yang wajar yang apabila penderitaan atau kepedihan yang menimpa si korban yang diinginkan dengan diberi kemungkinan mendapat penggantian kerugian.<sup>41</sup> Sehubungan dengan pentingnya perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap korban tindak kejahatan, Arif Gosita berkomentar sebagai berikut:

“Adakah wajar apabila kita sebagai bangsa yang mempunyai Pancasila dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang juga memperhatikan kepentingan para korban berbagai macam tindakan yang merugikan, benar-benar mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada para korban kejahatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan dengan berbagai cara. Apabila para pelaku dan para residivis yang pernah melakukan kejahatan mendapat layanan demi perikemanusiaan, maka para korban kejahatan yang bukan penjahat, jelas patut mendapatkan pelayanan juga.”<sup>42</sup>

#### **E. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Hukum Islam Dalam Perspektif**

Dalam perspektif hukum Islam pencabulan tidak di jelaskan secara langsung, tetapi menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik di lakukan oleh orang yang belum menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni 1998), h.34

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), h. 194

<sup>42</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), h.155

pernikahan, hal ini disebut sebagai zina.

Zina secara harfiah berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram bukan karena syubhat tetapi atas dasar syahwat.<sup>43</sup>

Sedangkan zina menurut M. Quraish Shihab, zina berarti “persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran). Hukumnya, salah satu dosa besar setelah syirik kepada Allah dan membunuh.

Dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, firman Allah dalam Q.S Al-Israa’/17: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>44</sup>

Kata mendekati di sini sudah termasuk pencabulan, apalagi melakukan perzinaan. Dimana kedua perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah “perbuatan-perbuatan yang di larang oleh

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.35

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 388



*syara'* yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>45</sup> Hukuman *had* adalah hukuman yang telah di tentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah, sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum di tetapkan oleh *syara'*, melainkan di serahkan kepada ulil amri, baik pelaksanannya maupun penentuannya.



---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Huikum Pidana Islam "Fikih Jinayah"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 32

### BAB III

#### METODELOGI PENELITIAN

Menurut Soejono Soekanto, istilah metode mengandung arti “jalan ke”, tetapi menurut kebiasaan metode di rumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: <sup>46</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang di gunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melakukan.

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. “Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang di sebut ilmu”. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karna ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang di maksud yang tercantum dalam metode ilmiah”. <sup>47</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.

---

<sup>46</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: UII Pres, 1984), h. 5

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h.46

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini memilih lokasi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan dokumen yang di butuhkan.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu:

- a. Yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu sosiologi.
- c. Teologi normatif syar'i (hukum Islam) yaitu pendekatan yang di lakukan dengan mempelajari dan menelaah ayat al-qur'an dan hadis Nabi saw, yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

## **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang di peroleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang di peroleh melalui angket yang di pandang meragukan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui library research atau penelitian

kepastakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.

#### **E. *Metode Pengumpulan Data***

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki baik pengamatan itu di lakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di lakukan di dalam situasi buatan, yang khusus di adakan.<sup>48</sup>
- b. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai.<sup>49</sup>
- c. Dokumentasi adalah teknik untuk pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### **F. *Instrumen Penelitian***

Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karna itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang di gunakan dalam melakukan wawancara yang di jadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa

---

<sup>48</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 26

<sup>49</sup> M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 126

daftar pertanyaan.

- b. Buku catatan dan alat tulis; berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- c. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.
- d. Kamera; berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap Hakim yang menangani kasus kesusilaan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Makassar.

#### ***G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data***

1. Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:
  - a. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
  - b. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
  - c. Koding data adalah penyesuaian data yang di peroleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
  - d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini

dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

## 2. Analisis data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Pengadilan Negeri Makassar terletak di jalan Kartini No. 18/23 kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Letak Pengadilan Negeri Makassar sangat strategis tepatnya berada di tengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat kota Makassar menjangkau pengadilan tersebut.

Adapun batas-batas letak Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan monument mandala;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan lapangan karebosi;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah sakit pelamonia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Bank mandiri cabang Makassar.

Letak Pengadilan Negeri Makassar juga tidak jauh perkotaan pemerintah lainnya, seperti kantor Wali Kota Makassar, Kantor BI Cabang Makassar, Menara Bosowa, dan pusat perbelanjaan, seperti Karebosi link, Makassar Trade Center (MTC), dan pasar sentral Makassar.

#### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar**

Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan, yakni tepatnya pada tahun 1916. Pada awalnya selain berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi rakyat pribumi, Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di Makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung Pengadilan Negeri

Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah gedung Pengadilan Negeri Makassar yang masih kental dengan corak khas belanda tersebut termasuk diantara situs-situs heritage (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh pemerintah Kota Makassar.

Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan.

## 2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar masuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi Sulawesi selatan dan barat dengan luas wilayah kurang lebih 300,45 Kilometer yang terdiri dari 14 kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Ujung Pandang
- b. Kecamatan Makassar
- c. Kecamatan Mariso
- d. Kecamatan Mamajang
- e. Kecamatan Bontoala
- f. Kecamatan Wajo
- g. Kecamatan Tamalate
- h. Kecamatan Rappocini
- i. Kecamatan Panakkukang
- j. Kecamatan Manggala
- k. Kecamatan Ujung Tanah
- l. Kecamatan Tallo
- m. Kecamatan Biringkanaya



n. Kecamatan Tamalanrea

Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa pengadilan khusus yang berada dibawah Pengadilan Negeri Makassar juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan pada Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan Niaga Makassar:

- 1) Sulawesi Selatan dan Barat
- 2) Sulawesi Tengah
- 3) Sulawesi Tenggara
- 4) Sulawesi Utara
- 5) Maluku
- 6) Irian Jaya

b. Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar

- 1) Sulawesi Selatan dan Barat
- 2) Sulawesi Tenggara
- 3) Sulawesi Tengah
- 4) Sulawesi Utara
- 5) Gorontalo
- 6) Maluku
- 7) Maluku Utara
- 8) Irian Jaya

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar

**Visi:**

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus yang Agung”

**Misi:**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus
2. Memberikan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus

**B. Duduk Perkara**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>50</sup>

**Petikan Surat Putusan Nomor : 1494/Pid.B/2016/PN Mks**

Nama lengkap : **MUH. FADLY Alias DOYOK.**  
 Tempat lahir : Makassar.  
 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Desember.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jalan Paropo I No. 2 Mks;  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.

Mengingat Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FADLY Alias DOYOK tersebut di atas, terbukti

---

<sup>50</sup> Pengadilan Negeri Makassar, (Berkas Perkara Kesusilaan), *An Muh. FADLY Alias Doyok*, (01 Juni 2016)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Kasur warna biru
  - b. 1 (satu) lembar kain gorden motif bunga-bunga warna kuning
  - c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam
  - d. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek SWISS ARMY
  - e. 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna pink
  - f. 1 (satu) lembar celana legging motif garis-garis warna putih hitam

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari: Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh kami **RIANTO ADAM PONTOH, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SRI RAHARDJO, SH.,M.Hum** dan **R. BERNADETTE SAMOSIR, SH** masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota, di bantu **SYAHRUL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri **NURHANI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Makassar dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

### ***C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur***

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>51</sup>

Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya sebagai berikut:

“Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Makassar, oleh Hakim menimbang bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya dengan adanya 2 alat bukti yang sebagaimana ditentukan dalam KUHP.<sup>53</sup> Uraian mengenai alat-alat bukti sah yang dimaksud dalam perkara

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 100

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>53</sup> Teguh Sri Rahardjo, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, Kamis 06 April 2017.

Pengadilan Negeri Makassar **Nomor: 1494/Pid.B/2016/PN Mks** adalah sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim secara yuridis:

1. Keterangan saksi korban

Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat didalam rumah kosong di jalan Pejuang 3 Kel. Paropo Kec. Panakkukang, Kota Makassar, terhadap foto yang diperlihatkan saksi masih mengenalinya yakni merupakan pelaku yang melakukan persetubahan terhadap saksi dengan cara pelaku mendorong kedua bahu saksi dan membaringkan diatas kasur kemudian membuka celana saksi hingga saksi telanjang pada bagian tubuh bagian bawah, selanjutnya pelaku mengangkat kaki saksi keatas kemudian pelaku memegang alat kelamin (vagina) saksi dan mengusap-usap alat kelamin saksi dengan tangannya, tidak lama kemudian pelaku menindis saksi dan merasa kesakitan pada alat kelamin hingga saksi berteriak namun pelaku langsung menutup mata dan mulut saksi sehingga saksi hanya bisa menangis dan alat kelamin saksi berdarah.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, menerangkan bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap korban Sarah Amelia ditemukan Serambi kemaluan (Vestibulum Vaginae) tampak lecet, selaput darah (Hymen) tampak luka robek naru arah jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 10, dan jam 1, disertai pendarahan, dan Liang Senggama tampak lecet disertai pendarahan.

### 3. Surat

Surat hasil visum et repertum Nomor: 133 / V / 2016 / Forensik menyatakan bahwa telah terjadi luka robek baru pada selaput darah disertai pendarahan dapat sesuai akibat persentuhan tumpul, dan Korban mendapatkan pengobatan dan rawat inap.

### 4. Petunjuk

Petunjuk dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah Kasur warna biru, 1 (satu) lembar kain gorden motif bunga-bunga warna kuning, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek SWISS ARMY, 1 (satu) lembar baju kaos tanpa lengan warna pink, 1 (satu) lembar celana legging motif garis-garis warna putih hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

### 5. Keterangan terdakwa

Bahwa awalnya terdakwa melihat sdri. SARAH AMELIA sedang berjalan yang kemudian terdakwa sedang baring-paring didepan rumah tante terdakwa kemudian terdakwa memanggilnya dan meminta untuk ditemani lalu terdakwa bersama sdri. SARAH AMELIA berjalan kelorong dan membawanya masuk kedalam salah satu rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni, selanjutnya terdakwa membaringkan sdri. SARAH AMELIA diatas Kasur namun sdri. SARAH AMELIA kembali berdiri lalu terdakwa membuka celananya dan kembali membaringkan diatas Kasur dengan cara mendorong badannya setelah itu terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan berlutut diatas Kasur sambil mengeluarkan alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa meraba-raba lalu membuka vaginanya menggunakan jari tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang kedua kaki sdri. SARAH AMELIA dan membuka lebar lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina sdri. SARAH AMELIA

sambal mendorong-dorong keluar masuk beberapa kali hingga terdakwa melihat darah keluar dari vagina sdri. SARAH AMELIA dan terdakwa pun berhenti kemudian langsung pergi meninggalkan sdri. SARAH AMELIA didalam rumah kosong tersebut.

Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, orang tua saksi korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama.

Menurut penulis dalam hal ini menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan karena kerugian yang dialami korban berdampak serius pada kelangsungan masa depannya, sehingga masa depan korban yang masih masuk dalam kategori anak menjadi suram dengan demikian patut diberikan sanksi yang setidaknya membuat terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah merugikan korban.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut penulis dalam hal ini menjadi dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan terdakwa menunjukkan sebagai rasa penyesalan yang terdalam akibat dari perbuatannya, sehingga rasa penyesalan tersebut dijadikan tolak ukur bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya, dan seseorang ketika belum pernah melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan untuk

pelaku memperbaiki prilakunya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dalam menjatuhkan hukuman Hakim lebih berpedoman kepada UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak daripada KUHP karena Undang-Undang perlindungan anak merupakan ketentuan atau peraturan yang lebih khusus terhadap korban yang masih dibawah umur, selain itu ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman pidana yang diatur dalam KUHP.<sup>54</sup>

Terkait dengan putusan Nomor. 1494/Pid.B/2016/PN Mks dari aspek perbuatan atau tindak pidana telah diulas sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan pidana oleh terdakwa telah terpenuhi baik unsure objektif maupun unsure subjektif. Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor. 1494/Pid.B/2016/PN Mks maka juga dapat dikatakan terpenuhi, walaupun sanksi yang diberikan bukan berupa sanksi pemidanaan melainkan penjatuhan tindakan. Berdasarkan UU Perlindungan Anak memang pada dasarnya tindakan merupakan suatu perbedaan sanksi dari pada sanksi pidana pada umumnya. Tindakan dapat dikatakan sebagai sanksi yang bersifat lunak. Tindakan diartikan sebagi pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pelaku.

Pada dasarnya tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Hal ini semata-mata ditujukan pada prefensi khusus yakni melindungi masyarakat dan ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Sekilas jika dikaji antara sanksi tindakan dalam putusan Nomor. 1494/Pid.B/2016/PN Mks hal ini menunjukkan

---

<sup>54</sup> Teguh Sri Rahardjo, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, Kamis 06 April 2017



bahwa putusan tersebut mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Meninjau dari pertimbangan hakim secara umum maka hal ini dapat dilihat ketika hakim memberikan putusan tindakan terhadap terdakwa yang didasarkan dengan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang patut untuk tidak diselesaikan dengan penjatuan pidana penjara. Hal ini secara logis juga dapat diketahui proporsi antara hal yang memberatkan dengan hal yang meringankan. Secara umum jumlah proporsi hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal yang memberatkan. Dengan demikian, Hakim disini bisa dilihat bahwa berpendapat putusan tindakan akan memberikan suatu upaya rehabilitatif tidak hanya terhadap pelaku akan tetapi juga korban. Korban disini kepentingannya menjadi terakomodasi sehingga pandangan bahwa pidana penjara untuk melakukan upaya pembalasan yang dilakukan terhadap terdakwa menjadi tidak berguna karena pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif ini meminimalisir adanya upaya balas dendam sehingga putusan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan solusi terbaik bagi terdakwa maupun korban.

#### ***D. Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam***

##### **1. Hukum Positif**

Didalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai tindak pidana ini diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut ketentuan pasal diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang dapat dikenakan sanksi, yakni:

##### **1. Setiap orang**

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

##### **2. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sengaja mengandung pengertian “memang dimaksudkan (diniatkan, dikehendaki); memang dengan niat (maksud) lebih dahulu.<sup>55</sup> Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi menyebabkan orang

---

<sup>55</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 913

yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

### 3. Memaksa

Memaksa mengandung pengertian dengan memperlakukan dengan paksa; melakukan (mendesak, menekan, dan sebagainya) dengan kekerasan (dengan kekuatan); mengharuskan dengan tidak boleh tidak atau harus.

### 4. Melakukan tipu muslihat

Tipu muslihat mengandung pengertian bermacam tipu, berbagai daya upaya yang buruk. Sedangkan tipu mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh.<sup>56</sup>

### 5. Serangkain kebohongan

### 6. Membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

## 2. Hukum Islam

Mengenai tindak pidana/kejahatan kesusilaan Hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan dimuka Hakim, hukumannya tegas dan jelas. Karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.<sup>57</sup>

Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya

---

<sup>56</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1079

<sup>57</sup> Bismar Siregar, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Barat* (Jakarta Pustaka Firdaus, 2001), h.204

sanksi diharapkan dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.<sup>58</sup>

Tindak pidana dalam Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dibedakan menjadikan 3, yakni; jarimah hudud (*had*), jarimah qishas, jarimah *ta'zir*. Yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah pada jarimah *hudud* dan jarimah *ta'zir*, sebagai berikut;

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman *had* apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk jarimah zina, ada 3 macam cara pembuktian, yaitu saksi, ikrar (pengakuan) dan Qorinah (petunjuk/indikasi). Hukuman jarimah zina ada dua macam, tergantung pada keadaan pelaku apakah sudah berkeluarga (*muhsan*) atau belum (*ghair muhsan*).

Bagi pezina *muhsan* (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal, sesuai dengan sabda Nabi saw:

حذو عني حذو عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وثقي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرج

Artinya:

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada meraka (yang berzina). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) yang berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu. (HR. Muslim)<sup>59</sup>

Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa si pezina itu langsung dirajam sampai mati tanpa perlu terlebih dahulu dihukum cambuk seratus kali, seperti

<sup>58</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)* (Bandung: Al Syamil, 2001), h. 185

<sup>59</sup>Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhary Jilid I, II, III & IV* (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), h.100

yang telah dikerjakan Nabi dengan merajam dua orang pezina Yahudi tanpa mencambuk mereka terlebih dahulu. Sebelum dijatuhi hukuman rajam sampai mati, maka harus dipenuhi beberapa persyaratan yaitu pezina dalam keadaan sehat pikiran, seorang muslim, telah atau pernah menikah, telah mencapai usia baliqh dan telah merdeka.<sup>60</sup>

Bagi pezina *ghair muhsan*

Adapun tahapan terakhir pelarangan zina adalah dengan pemberian hukuman bagi pelaku *ghair muhsan* (belum menikah). Bagi pelaku *ghair muhsan*, hukumannya adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Mengenai ketentuan sanksi tambahan (hukuman pengasingan 1 tahun), diatur dalam hadist Rasulullah saw:

عن زيد بن خالد الجهدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زانية ولم يحصن جلد مائة وتعريب عام

Artinya:

Dari zhaid bin Khaliq berkata: bahwa saya telah mendengar dari Nabi saw, beliau memerintahkan dalam perkara orang yang berzina tidak mushan agar diberi sanksi hukuman seratus kali dera dan pengasingan satu tahun. (H.R. Bukhari)<sup>61</sup>

Terdapat beberapa pendapat mengenai sanksi hukuman tambahan ini (hukuman pengasingan), yaitu:<sup>62</sup>

- a. Menurut Imam Malik, hukuman pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki sedangkan perempuan tidak ditimpahkan hukuman tersebut.
- b. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, menyetujui hukuman pengasingan selama satu tahun sebagai hukuman tambahan terhadap hukuman dera.

<sup>60</sup> Abd Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta 1992), h.36

<sup>61</sup> Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhary Jilid I, II, III & IV* (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), h.100

<sup>62</sup> Asyahari Abd Ghafar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Grafindo Utama 1987), h.28

- c. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman pengasingan dapat diterapkan setelah adanya pertimbangan hakim atau kebijaksanaan yang menangani perkara.
- d. Menurut kebanyakan ulama (Imam Syafi'i al Qurtubi, dan Khulafaur Rasyidin) perlunya diberikan hukuman dera dan pengasingan bagi para pezina ghair muhsan.

Yang dibahas dalam skripsi ini adalah jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan ahlak. Termasuk dalam hal ini perbuatan mendekati zina.<sup>63</sup>

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*.<sup>64</sup>

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, fajri, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum,

---

<sup>63</sup> Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina (Pandangan Hukum Islam dan KUHP)*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), h. 9

<sup>64</sup> A Rahman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 52

apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.<sup>65</sup>

Dengan adanya pemahaman demikian itu, maka setidaknya-tidaknya proses penyelesaian hukumnya dan penjatuhan sanksi hukumannya kepada pelaku pencabulan anak dibawah umur dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah standar minimal dan bukan mengacu secara mutlak terhadap kasus perzinahan, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi hukumnya.



---

<sup>65</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kalau terbukti bersalah, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mencari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam, pencabulan merupakan bentuk jarimah *ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pencabulan, akan tetapi pencabulan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku pencabulan berupa hukuman jilid.



## **B. Implikasi**

Adapun saran penulis terkait pencabulan anak dibawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat menghindari perbuatan cabul hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri, dapat dicegah dari hal sekecil apapun.
2. Pemerintah atau lembaga penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa pencabulan anak dibawah umur, yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-Undang khusus pencabulan anak dibawah umur yang dapat diberlakukan bagi pelaku pencabulan.
3. Supremasi hukum perlu ditegakkan terutama pada pelaku pencabulan, mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan maka perlu diberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya.
4. Bagi Akademisi Hukum, agar kiranya mampu melihat segala aspek pertimbangan dalam rangka memberikan suatu putusan sehingga mampu mengakomodir rasa keadilan masyarakat itu sendiri, dan memberikan solusi yang jelas dan spesifik mengenai pengertian tindak pidana pencabulan, mengingat banyak masyarakat yang masih awam mengenai pembatasan tindak pidana pencabulan itu sendiri, sehingga sering kali terjadi perbuatan cabul dan mereka tidak menyadarinya bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan cabul yang patut dilakukan penuntutan. Ini menunjukkan bahwa masih awamnya masyarakat kita tentang hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Kartina, 1989.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Bukhary, Al-Imam. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhary Jilid I, II, III & IV*. Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009.
- Malik, Muhammad Abdul. *Perilaku Zina (Pandangan Hukum Islam dan KUHP)*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003.
- Bungin, M. Burhan. *Metode Peneliian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Ghafar, Asyahari Abd. *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Grafindo Utama 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet. 1; Alauddin University Press, 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- I Doi, Abd Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: BPK Gunung Mulya, 1982.
- Utrecht, E. an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta:

- Sinar Harapan, 1983.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Merpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Irfan, Muhammad dan Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Marlina. *Peradilan pidana Anak di Indonesia “ Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice”*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*. Wipress, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rahman, A. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1984.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarto. *Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- \_\_\_\_\_. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2009.
- Siregar, Bismar. *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Barat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas)*. Bandung: Al Syamil, 2001.
- Wahono, Francis. *Kekerasan Dalam Pendidikan: Kasus-Kasus Gerakan Sosial Di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press, 2003.

## RIWAYAT HIDUP



Ketatanegaraan.

**Magfirah**, lahir di Sinjai pada 15 Juli 1995. Putri ketiga dari lima bersaudara. Memulai pendidikan di SDN 53 Kalamisu Sinjai Selatan dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs Pattalasang Sinjai Timur dan lulus pada tahun 2010. Penyusun kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Neg. 1 Sinjai Timur dan lulus pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan pendidikan perguruan tinggi Islam di UIN Alauddin Makassar pada tahun yang sama dan lulus di jurusan Hukum Pidana dan

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?
2. Bagaimana sanksi pembedanaannya bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur?
3. Kendala apa-apa saja yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan sanksi kepada pelaku pencabulan?
4. Mengapa dalam pemberian sanksi pengadilan lebih banyak berpedoman kepada undang-undang perlindungan anak daripada KUHP?
5. Bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban?
6. Mengapa terjadi pencabulan terhadap anak dibawah umur dan bagaimana sikap islam terhadap kasus tersebut?

## DOKUMENTASI PENGAMBILAN BERKAS PUTUSAN



M A K A S S A R

## DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR





Permohonan masalahaya !

4/16/10

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan/Program Studi  
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Permohonan  
no 2

Assalamu Alaikum Wr. Wb.  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Magfirah  
Nim : 10300113244  
Semester/Klpk : VII/HPK E  
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul sebagai berikut :

- ☒ Tinjauan yuridis terhadap upaya perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kota Makassar. / judul saku asr
- ☒ 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan korban anak yang masih di bawah umur di Pengadilan Negeri Makassar.
- ☒ Optimalisasi penyidik terhadap prosedur pemeriksaan tersangka dalam kasus perjudian di Wilayah Hukum Kota Makassar. / judul saku asr

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,  
Penasehat Akademik

Dr. Hj. Nurnaningsih, M.Ag  
NIP : 19550421 198503 2 002

Pemohon



Magfirah  
10300113244



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor 711 Tahun 2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI**  
**TAHUN 2016**

**Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor Nomor 129 C tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Hamzah Hasan, M. Hi  
2. Awalia Musgami, S. Ag., M. Pd

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Magfirah

NIM : 10300113244

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ HPK

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Korban Anak yang Masih Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Makassar Perspektif Hukum Islam

b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;

c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNPB UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;

d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata

5 Desember 2016

**Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag**  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;  
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.  
424836

Samata, 5 Desember 2016

Nomor : SL.2/PP.00.9/2016  
Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi  
An. Sdr (i). Magfirah

Kepada YTH.

1. Dr. Hamzah Hasan, M. Hi (Pembimbing I)
2. Awalia Musgami, S. Ag., M. Pd (Pembimbing II)

Di,

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 14 Desember 2016

Waktu : 13.00 wita

Tempat : Ruang LT Lantai 1 Fak. Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dengan Korban Anak yang Masih Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Makassar Perspektif Hukum Islam

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*



Ketua Jurusan,  
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Dra. Nila Sastrawati, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor: 125/HPK/2017

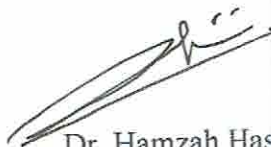
Judul Skripsi: **Petimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam**  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)

Samata, 15 Maret 2017  
Penyusun,



**Magfirah**  
Nim. 10300113244

**Pembimbing I**



**Dr. Hamzah Hasan, M. Hi**  
Nip. 19631231 199302 1 003

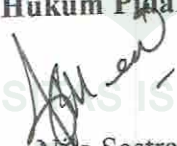
**Pembimbing II**



**Awalia Musgami, S. Ag., M. Pd**  
Nip. 19750822 200604 2 002

Diketahui Oleh:

**Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**



**Dra. Nifa Sastrawati, M. Si**  
Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Alauddin Makassar**



**Prof. Dr. Darussalam, M. Ag**  
Nip. 19621016 1990031 003



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 469 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)  
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi H P K tanggal 4 Mei 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juntamente Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kedua** : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Ketiga** : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Keempat** : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 4 Mei 2017  
Dekan  
  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**NOMOR : TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI				PELAKSANA KETUA/SEKANG.
		MKD/FIKIH & USUL FIKIH	MKD/IDS	MKKP		
01	02	03	04	05	06	
<del>1</del>	hanisa Ayu Solichin 10300113225	Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag	Dr. Achmad Musyahid, M.Ag	Dr. Fatmawati Hilal, M.Ag	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid	
2	Magfirah 10300113244	Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A	Dr. Kurniati, M.Hi	Dr. Rahma Amir, M.Ag	Dr. Hamsir, M.Hum Dra. Andi Masniah Nurjannah	
3	Muh. Baso Aqil Azizi 10300113162	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	Dr. Sohrab, M.Ag	Dra. Nila Sastrawati, M.Si	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Dra. Andi Masniah Nurjannah	



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
19621016 199003 1003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

**DAFTAR NILAI**  
**UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**  
**SEMESTER .....8..... (.....) WISUDA PERIODE ..SEPTEMBER 2017**  
**TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**Nama** : MAGFIRAH

**NIM** : 10300113244

**Jurusan** : Hukum pidana dan ketatanegaraan

**Judul Skripsi** : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam.  
( Studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar)

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	4	4	12	4

Samata, 31 Mei 2017

Kasubag.  
Akademik dan Kemahasiswaan



**MUJAHIDAH, S.E**

NIP : 19670309 199303 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **MAGFIRAH, NIM: 10300113244**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)*. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 31 Mei 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Hamzah Hasan, M. Hi**  
NIP. 19631231 199302 1 003



**Awaliah Musgamy, S. Ag., M. Ag**  
NIP. 19750822 200604 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R







Nomor : SLI/PP.00.9/2093/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 08 Juni 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag ( Ketua )
  2. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. ( Sekretaris )
  3. Prof.Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A. ( Penguji I )
  4. Dr. Alimuddin, M.Ag ( Penguji II )
  5. Dr. Hamzah Hasan, M.HI.. ( Pembimbing I )
  6. Awaliah Musgamy, S.Ag., M.Ag ( Pembimbing II )
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Magfirah  
N I M : 10300113244  
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan ( HPK )

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017  
Waktu : Pukul 13.00–14.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan HPK

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **MAGFIRAH, NIM: 10300113244**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, *"Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)"*. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 10 Juli 2017

Pembimbing I



**Dr. Hamzah Hasan, M. Hi**

NIP. 19631231 199302 1 003

Pembimbing II



**Awaliah Musgamy, S.Ag., M. Ag**

NIP. 19750822 200604 2 002

Penguji I



**Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A**

NIP. 19520811 196203 1 001

Penguji II



**Dr. Alimuddin, M.Ag**

NIP. 19720302 200001 1 002




**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 80 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Magfirah  
NIM: : 10300113244  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2017  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum.  
Penguji I : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.  
Penguji II : Dr. Alimuddin, M.Ag.  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 17 Juli 2017  
Dekan  
  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 2360/SI.1/PP.00.9/07/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 17 Juli 2017

Kepada

Yth.

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. Hamsir, M.Hum. (Sekertaris)
3. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A (Penguji I)
4. Dr. Alimuiddin, M.Ag (Penguji II)
5. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I. (Pembimbing I)
6. Awaliah Musgamy, S.Ag, M.Ag. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di  
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Magfirah  
N I M : 10300113244  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah, Insha Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juli 2017  
Buka Sidang : 08.30 WITA  
Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *"Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)"*. Yang disusun oleh saudara/I **MAGFIRAH**, NIM: 10300113244, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 19 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 25 Juli 2017

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum

Munaqisy I : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A

Munaqisy II : Dr. Alimuddin, M.Ag

Pembimbing I : Dr. Hamzah Hasan, M. Hi

Pembimbing II: Awaliah Musgamy, S. Ag., M. Ag

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/13872017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 21 Maret 2017

*Kepada*

*Yth* Ketua Pengadilan Negeri Makassar

**Di**  
**Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Magfirah
Nim	: 10300113244
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / HPK
Semester	: 8 (Delapan)
Alamat	: Perum. Bumi Tirta Nusantara II Blok H/4 Tello Baru, Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**Petimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hamzah Hasan, M. Hi  
2. Awalia Musgami, S. Ag., M. Pd

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 28 Maret 2017 s/d 28 April 2017.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Samata, 21 Maret 2017



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 06 April 2017

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 104 /HKM/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

**BASO RASYID, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MAGFIRAH**  
NIM : 10300113244  
Fakultas/Jurusan : Syar'iah dan Hukum / HPK  
Alamat : Perum. Bumi Tirta Nusantara II Blok H/4 Tello Baru Mks  
Judul Penelitian : **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)"**.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017, dan telah dibimbing oleh :

1. **TEGUH SRI RAHARDJO, SH.,MH**

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tanggal 21 Maret 2017 Nomor : SI.1/PP.00.9/ /2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA  
  
**BASO RASYID, SH.MH**  
NIP.196112101982031007